

ABSTRAK

Pelaku tindak pidana anak wajib ditangani secara khusus oleh penyidik anak yaitu Unit Pelayanan perempuan dan anak, Unit PPA wajib menerapkan keadilan *Restorative, Restorative Justice* yaitu duduk Bersama melakukan musyawarah Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Peran Unit PPA dalam menerapkan prinsip *Restorative Justice*, yaitu sebagai fasilitator atau mediator. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana peran unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) dalam penerapan prinsip *Restorative Justice* pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris yaitu penelitian menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Kesimpulan penelitian ini adalah dalam melakukan penerapan prinsip *restorative justice/diversi*, Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Unit Kepolisian Resort Karawang sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman tata cara pelaksanaan Diversi

Kata Kunci: Peran Unit Perempuan dan Anak (PPA), Peradilan Pidana Anak, *Restorative Justice*.

KARAWANG

ABSTRACT

Perpetrators of child crimes must be handled specifically by child investigators, namely the Women and Children Service Unit, the PPA Unit is required to implement Restorative justice, Restorative Justice, namely sitting together to conduct deliberations together to find a fair solution by emphasizing restoration to its original state and not retaliation. The role of the PPA Unit in applying the principles of Restorative Justice, namely as a facilitator or mediator. The problem raised in this study is how the role of the women's and children's service unit (PPA) in the application of the principles of Restorative Justice to crimes committed by children based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. In this study, the authors used an empirical juridical approach. Juridical empirical, namely research to analyze problems carried out by combining legal materials which are secondary data with primary data obtained in the field. The conclusion of this study is that in implementing the principles of restorative justice / diversion, the Service of Women and Children (PPA), the Karawang Resort Police Unit is in accordance with the procedures stipulated by Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System and PERMA Number 4 of 2014 concerning Guidelines for the implementation of Diversion

Keywords: Role of Women and Children Unit (PPA), Child Criminal Justice, Restorative Justice.